

Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian DPR RI
BUDGET ISSUE BRIEF
Ekonomi & Keuangan

Vol 01, Ed 6, April 2021

**TINJAUAN ATAS CAPAIAN KINERJA PEN
TERHADAP PEREKONOMIAN NASIONAL
DAN DAERAH**

Hal. 1

**POTENSI KINERJA NERACA DAGANG
INDONESIA MELALUI PERJANJIAN IE-CEPA**

Hal. 3



Daftar Isi

Artikel 1 Tinjauan Atas Capaian Kinerja PEN Terhadap Perekonomian Nasional dan Daerah	1
Artikel 2 Potensi Kinerja Neraca Dagang Indonesia Melalui Perjanjian IE-CEPA.....	3

Dewan Redaksi

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Pemimpin Redaksi

Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM

Redaktur

Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.

Damia Liana, S.E.

Nadya Ahda, S.E

Editor

Ervita Luluk Zahara S.E.

Sekretariat

Husnul Latifah, S.Sos.

Memed Sobari

Musbiyatun

Hilda Piska Randini, S.I.P.

Budget Issue Brief Ekonomi dan Keuangan ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan di terbitan ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Badan Keahlian DPR RI.

Komisi XI

EKONOMI DAN KEUANGAN

TINJAUAN ATAS CAPAIAN KINERJA PEN TERHADAP PEREKONOMIAN NASIONAL DAN DAERAH

HIGHLIGHT

- Sejak pandemi Covid-19 mewabah, pola pertumbuhan ekonomi berubah menjadi *government-driven growth*. Sepanjang 2020 hanya pengeluaran pemerintah yang mengalami pertumbuhan positif, yaitu 1,9%.
- PEN merupakan salah satu kebijakan keuangan negara yang memiliki peran besar dalam mempercepat penanganan pandemi dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mengalokasikan dana PEN 2021 sebesar Rp699,42 triliun, meningkat 20,6% dari realisasi PEN 2020.
- Dampak positif dari pelaksanaan PEN 2020 terlihat pada pertumbuhan ekonomi tumbuh ke arah positif yakni -2,19%, membaiknya kinerja manufaktur dengan nilai PMI berada pada level ekspansif pada TW I-2021 yaitu 5,01%, serta SKDU positif dengan SBT 4,5% pada TW I-2021.
- Namun, pelaksanaan PEN saat ini belum mampu meredam lonjakan kemiskinan dan tingkat pengangguran. Di tingkat daerah, meskipun mengalami perbaikan pertumbuhan, hampir seluruh provinsi mengalami kontraksi pertumbuhan, terlebih Bali yang tercatat berkontraksi -9,31% pada TW-IV 2020 (*yoj*).

Penopang pertumbuhan ekonomi selama menghadapi permasalahan pandemi Covid-19 ialah pengeluaran pemerintah, dimana saat ini terjadi perubahan struktur ekonomi Indonesia, dari *consumption driven-growth* ke *government-driven growth*. Sebelum pandemi, pola pertumbuhan ekonomi menurut pengeluaran didominasi oleh sektor konsumsi rumah tangga yaitu berkontribusi sebesar 55%-57% terhadap PDB, kemudian diikuti oleh sektor investasi sebesar 31%-33%. Namun saat pandemi berlangsung, pola pertumbuhan ekonomi berubah menjadi *government-driven growth*, yang mana sepanjang tahun 2020 hanya pengeluaran pemerintah yang mengalami pertumbuhan positif sebesar 1,9%. Sementara, sisanya tumbuh negatif sejak TW-II 2020.

Salah satu kebijakan keuangan negara yang menjadi faktor utama dalam mempercepat penanganan pandemi yaitu Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Belum berakhirnya dampak pandemi Covid-19 serta kondisi pemulihan ekonomi yang sangat dinamis, Pemerintah mengalokasikan dana PEN 2021 yang meningkat 20,6% dari realisasi PEN 2020, yaitu sebesar Rp699,42 triliun. Selanjutnya, di tahun 2021, PEN difokuskan pada 5 bidang, yakni kesehatan Rp157,4 triliun, dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi Rp186,8 triliun, insentif usaha dan pajak Rp53,9 triliun, serta program prioritas Rp125,1 triliun. Mengingat peran strategis program PEN tersebut, tentu harus menjadi perhatian berbagai pihak, khususnya DPR. Untuk mengevaluasi efektivitas program, maka perlu ditinjau dampak kinerja pelaksanaan PEN terhadap beberapa indikator perekonomian, baik nasional maupun di tingkat daerah.

Kinerja PEN dan Capaiannya

Realisasi program PEN 2020 adalah sebesar Rp579,8 triliun atau 83,4% dari total anggaran Rp695,2 triliun. Serapan terbesar terdapat pada klaster pembiayaan korporasi (100%), sektoral K/L dan pemda (98,1%), serta dukungan UMKM (96,6%) dan perlindungan sosial (95,7%). Sementara serapan terendah ada pada klaster insentif usaha (46,7%) dan kesehatan (63,8%) (Kementerian Keuangan). Selanjutnya untuk tahun 2021, hingga 1 April 2021, realisasi program PEN 2021 mencapai Rp123,26 triliun atau 17,6% dari total anggaran.

Program yang dijalankan sejak Juni 2020 berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2020 telah memberikan harapan terhadap kondisi ekonomi. Hal ini terlihat pada TW-III 2020 terjadi pertumbuhan ekonomi hingga 5,05% (*qtq*) dibandingkan dengan TW-II. Namun, memang secara tahunan, pertumbuhan TW-III masih berkontraksi 3,49% (*yoj*), sehingga akhir tahun 2020 pertumbuhan ekonomi tercatat menjadi -2,19%. Selanjutnya, perbaikan ekonomi juga terlihat dari beberapa indikator ekonomi lainnya, di antaranya kinerja sektor industri pengolahan diperkirakan meningkat dan berada dalam fase ekspansi.

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

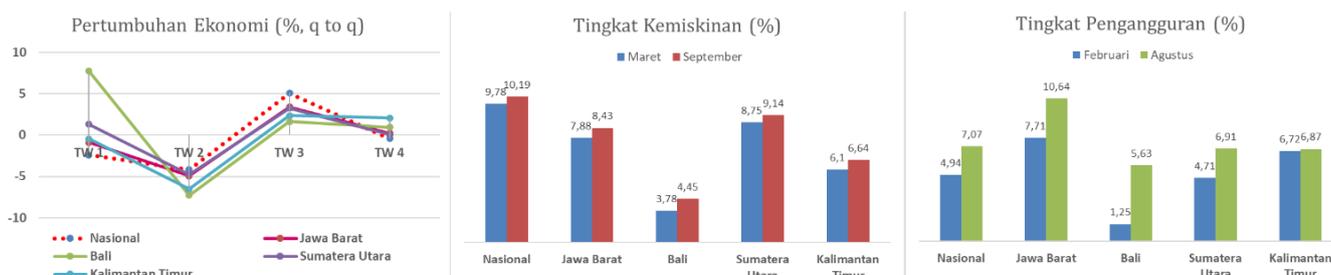
Penanggung Jawab : Dr. Asep Ahmad Saefuloh, SE
 Redaktur : Robby Alexander Sirait · Dwi Resti Pratiwi · Nadya Ahda · Damia Liana · Ervita Luluk Zahara · Syafrizal Syaiful · Achmad Machsuni · Tohap Banjarnahor ·

Penulis: Dwi Resti P. & Hikmatul Fitri



Hal itu terlihat dari *Prompt Manufacturing Index* (PMI) BI terus mengalami perbaikan, dari TW-III 2020 yang sebesar 44,91%, menjadi 50,01% pada TW-I 2021. Sejalan dengan itu, hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) menunjukkan kinerja kegiatan usaha yang positif, saldo bersih tertimbang (SBT) pada TW-III 2020 yang sebesar -35,75% tumbuh positif menjadi 4,5% pada TW-I 2021.

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi (qtq), Tingkat Kemiskinan (%) dan Tingkat Pengangguran di Beberapa Provinsi Tahun 2020



Sumber: BPS

Meskipun program PEN telah mendorong berbagai perbaikan indikator ekonomi, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya mampu menahan lonjakan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran. Tercatat secara nasional, angka kemiskinan pada semester-II tahun 2020 meningkat menjadi 10,19% dari 9,78% pada semester-I tahun 2020. Bahkan tingkat pengangguran mengalami lonjakan sangat tajam dari 4,94% di bulan Februari menjadi 7,07% di bulan Agustus 2020 (BPS, 2020). Tentunya hal ini menyisakan pekerjaan rumah yang cukup berat untuk menurunkan kembali angka kemiskinan dan tingkat pengangguran.

Di tingkat daerah, khususnya provinsi dengan kasus Covid-19 yang cukup tinggi, mengalami pukulan ekonomi yang cukup berat, seperti Jawa Barat, Bali, Kalimantan Timur, dan Sumatera Utara. Pada TW-III 2020, secara umum, seluruh provinsi menunjukkan perbaikan, terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang positif dibandingkan TW-II 2020 (gambar 1). Namun, hingga akhir tahun 2020, hampir seluruh provinsi mengalami kontraksi pertumbuhan, bahkan Bali tercatat mengalami kontraksi yang sangat dalam hingga 9,31% (*yoy*). Pukulan ekonomi tersebut juga berdampak pada peningkatan angka kemiskinan yang cukup tinggi terutama di Jawa Barat yaitu dari 7,88% pada Maret menjadi 8,4% pada September 2020. Bahkan sejak dijalankan program PEN, tingkat pengangguran masih meningkat tajam di beberapa provinsi. Pada gambar 1, terlihat bahwa

kenaikan angka pengangguran tertinggi terjadi di Bali yang mengalami lonjakan dari 1,25% (April) menjadi 5,63% (Agustus).

Berbagai permasalahan PEN yang belum teratasi tentunya akan semakin menghambat upaya pemulihan ekonomi. Permasalahan tersebut di antaranya, ketersediaan data dan ketepatan sasaran kebijakan yang dilakukan pemerintah

menghadapi masalah yang cukup serius dalam efektivitas PEN. Sebagai contoh, timbul orang miskin baru yang belum terdata oleh negara, yang berakibat tidak tersalurkan bantuan tersebut. Contoh lainnya, pada kebijakan subsidi gaji di bawah 5 juta, kurang mampu mendeteksi pada sektor informal. Permasalahan PEN lainnya adalah penyerapan anggaran di tingkat daerah mengalami banyak kendala teknis/non-anggaran seperti di bidang kesehatan dan jaring pengaman sosial. Ditambah, berbagai kebijakan pemerintah pusat terkadang belum mendapat *support* optimal di daerah, selain karena kurangnya informasi, juga kurang optimalnya perhatian dari pemerintah di daerah (Kemenkeu).

Rekomendasi

Dalam meningkatkan efektivitas PEN, maka penting dilakukan peningkatan sinergi yang baik antara unit-unit vertikal pemerintahan dengan satuan kerja maupun pemerintah daerah yang menjadi kunci penting dalam menjalankan program PEN. Selain itu, peningkatan pemahaman kepada semua *stakeholder* dan pemerintah daerah mengenai program ini menjadi hal yang krusial dalam keberhasilan program, termasuk sosialisasi kepada masyarakat agar mereka mengetahui hak dan kewajibannya dalam program tersebut. Selanjutnya, evaluasi serta pengawasan yang baik menjadi katalis yang tepat dalam menjalankan program.

POTENSI PERBAIKAN KINERJA NERACA DAGANG INDONESIA MELALUI PERJANJIAN IE-CEPA

HIGHLIGHT

- Pemerintah dan DPR RI akhirnya mengesahkan RUU tentang IE-CEPA, perjanjian kerja sama ekonomi antara Indonesia dan negara anggota EFTA.
- Salah satu isu yang diatur dalam perjanjian adalah mengenai penghapusan bea masuk (tarif 0 persen) di masing-masing negara EFTA dan di Indonesia.
- Sempat menunjukkan tren penurunan pada 2016-2019, kinerja neraca dagang Indonesia-EFTA mulai bangkit tahun 2020.
- Perjanjian IE-CEPA diproyeksikan dapat meningkatkan ekspor dan impor (dengan kenaikan ekspor yang lebih besar), sehingga dapat mencetak kinerja surplus pada neraca dagang dan memberikan efek pengganda bagi PDB Indonesia.
- Pemerintah harus segera menyusun peraturan pendukung serta mensosialisasikannya, memanfaatkan perjanjian ini sebagai upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi, serta melakukan percepatan ekspor yang lebih giat agar implementasi perjanjian ini efektif memperbaiki kinerja neraca dagang Indonesia secara umum.

Pada Rapat Paripurna DPR RI 9 April 2021, pemerintah dan DPR RI akhirnya mengesahkan RUU tentang *Indonesia-European Free Trade Association (EFTA) Comprehensive Economic Partnership Agreement* atau IE-CEPA, sebuah perjanjian kerja sama ekonomi antara Indonesia dengan negara-negara EFTA, yaitu Swiss, Norwegia, Islandia, dan Liechtenstein. Bermula pada tahun 2005, perundingan ini terus dilakukan hingga 9 putaran selama tahun 2011-2014. Akhirnya, pada tanggal 16 Desember 2018, perjanjian ini resmi diteken. Sebagai upaya lanjutan, selama tahun 2019-2021, DPR RI melakukan ratifikasi perjanjian, yang akhirnya pada tanggal 22 Maret 2021, Komisi VI DPR RI sepakat menyetujui RUU IE-CEPA untuk disahkan pada Rapat Paripurna.

Secara garis besar, ada beberapa isu yang diatur dalam perjanjian ini, antara lain mengenai perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, serta berbagai isu lainnya seperti perdagangan dan pembangunan berkelanjutan. Di sektor perdagangan barang, perjanjian ini memberikan keuntungan bagi Indonesia, salah satunya berupa penghapusan bea masuk (tarif 0 persen) di masing-masing negara EFTA, yaitu tarif 0 persen untuk 6.338 pos tarif (91,04 persen dari total pos tarif) di Norwegia yang mencakup 99,75 persen nilai impor Norwegia dari Indonesia, tarif 0 persen untuk 8.100 pos tarif (94,28 persen dari total pos tarif) di Islandia yang mencakup 99,94 persen nilai impor Islandia dari Indonesia, serta tarif 0 persen untuk 7.042 pos tarif (81,74 persen dari total pos tarif) di Swiss dan Liechtenstein yang mencakup 99,65 persen nilai impor Swiss dan Liechtenstein dari Indonesia. Sebaliknya, bea masuk di Indonesia juga dieliminasi pada 8.565 pos tarif yang mencakup 98,81 persen nilai impor Indonesia dari negara EFTA. Saat ini, pemerintah tengah membuat peraturan pendukung berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur tata cara penganan serta penetapan tarif bea masuk tersebut.

Perkembangan Kinerja Perdagangan Indonesia-EFTA

Selama 5 tahun terakhir, total nilai perdagangan Indonesia-EFTA cenderung mengalami penurunan, khususnya pada tahun 2016-2019. Bahkan pada tahun 2018-2019, neraca dagang Indonesia-EFTA mengalami defisit akibat penurunan ekspor yang cukup tajam. Setelah perjanjian diteken pada akhir tahun 2018, kinerja perdagangan Indonesia-EFTA mengalami sedikit perbaikan pada tahun 2019. Bahkan untuk tahun 2020, total nilai perdagangan meningkat hampir 2 kali lipat dengan kinerja ekspor yang meningkat hampir 3 kali lipat dan neraca dagang yang surplus.

Sementara untuk tahun 2020, berbagai jenis produk unggulan dari Indonesia yang paling banyak diimpor oleh negara EFTA antara lain alas kaki (HS-64), mesin listrik dan peralatan (HS-85), serta logam mulia dan

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

Penanggung Jawab : Dr. Asep Ahmad Saefuloh,
S.E., M.Si

Redaktur: Robby Alexander Sirait · Dwi Resti Pratiwi · Nadya Ahda · Damia Liana · Ervita Luluk Zahara

Penulis: Nadya Ahda & Fadila Putri Lenggo Geni



perhiasan (HS-71). Namun apabila dilihat dari *share*-nya terhadap total nilai impor negara EFTA untuk komoditas terkait, nilai impor dari Indonesia masih relatif sangat kecil. Sebagai contoh untuk produk HS-64, *share* impor dari Indonesia di pasar Norwegia hanya 5,76 persen, Islandia 5,52 persen, dan Swiss 4,34 persen. Meskipun demikian, Indonesia masih berada pada *top-5* negara pemasok produk HS-64 di negara EFTA, bersaing dengan China, Vietnam, Italia, dan Portugal. Apabila melihat *list* produk ekspor unggulan Indonesia secara keseluruhan ke pasar dunia, ketiga contoh produk di atas masuk dalam *top-10*, dengan HS-64 berada di peringkat 9, HS-85 di peringkat 4, dan HS-71 di peringkat 5. Dari sini tersirat bahwa salah satu tujuan adanya perjanjian ini adalah diversifikasi pasar untuk produk unggulan ekspor Indonesia ke negara-negara dimana *market share* dari Indonesia masih relatif kecil.

Implikasi dan Rekomendasi

Bertujuan untuk memperluas akses pasar bagi aktivitas perdagangan Indonesia-EFTA, perjanjian ini diekspektasikan dapat memperbaiki kinerja neraca dagang Indonesia. Berdasarkan kajian Naskah Akademiknya, salah satu implikasi penting dari penghapusan tarif bea masuk di atas adalah peningkatan *output* dari sektor yang dihapuskan tarifnya yang kemudian akan berdampak pada peningkatan ekspor serta perbaikan neraca dagang sektor terkait menjadi surplus. Secara umum, dengan adanya perjanjian ini, diproyeksikan ekspor Indonesia ke EFTA akan meningkat dengan rata-rata peningkatan USD 1,92 miliar per tahun (dengan asumsi tren kenaikan ekspor Indonesia ke EFTA periode 2014-2018 sebesar 31,6 persen). Untuk tahun pertama, diprediksikan ekspor Indonesia ke EFTA akan meningkat USD 1,03 miliar dan kemudian akan meningkat menjadi USD 3,08 miliar pada tahun kelima. Adapun produk ekspor utama Indonesia yang diproyeksikan akan meningkat antara lain logam mulia dan perhiasan, peralatan (perangkat televisi), serta lensa optik. Sementara untuk impor, diproyeksikan impor Indonesia juga akan meningkat dengan rata-rata peningkatan USD 1,53 miliar per tahun. Untuk tahun pertama, diprediksikan impor Indonesia dari EFTA akan meningkat USD 1,25 miliar dan kemudian akan meningkat menjadi USD 1,89 miliar di tahun kelima. Adapun produk impor dari EFTA yang diproyeksikan akan meningkat antara lain emas, bagian turbin gas, dan tinta cetak.

Apabila berbicara soal neraca dagang, dengan berlakunya perjanjian ini, proyeksi kenaikan ekspor Indonesia masih melebihi proyeksi kenaikan impornya, sehingga diekspektasikan neraca dagang Indonesia-EFTA akan terus terjaga surplus. Tidak

hanya itu, implementasi perjanjian ini juga memberikan efek pengganda bagi perekonomian Indonesia secara umum, yaitu dengan proyeksi peningkatan PDB mencapai 1,81 persen.

Perjanjian kerja sama ekonomi ini tentu bukanlah perjanjian pertama bagi Indonesia. Sebelumnya, Indonesia telah meneken perjanjian dengan beberapa negara, misalnya Australia (IA-CEPA). Resmi berlaku pada Juli 2020, implementasi IA-CEPA secara umum belum menunjukkan kinerja yang menjanjikan di tahun pertama ini. Neraca dagang bulanan masih defisit, dengan laju kenaikan impor yang masih lebih cepat daripada ekspornya. Sebaliknya, perjanjian dengan Pakistan (IP-PTA) yang diimplementasikan pada Maret 2019 telah mampu meningkatkan surplus neraca dagang, dengan kenaikan ekspor yang menjanjikan dan kecenderungan penurunan impor selama 2019-2020. Kemudian, perjanjian dengan Chile (IC-CEPA) yang berlaku sejak Agustus 2019 juga telah mencetakkin kinerja surplus pada neraca dagang Indonesia-Chile 2020 dengan peningkatan ekspor yang signifikan dan kecenderungan penurunan impor. Salah satu perjanjian kerja sama ekonomi yang sudah berlaku sejak Juli 2008, yaitu dengan Jepang (IJ-EPA), cenderung menunjukkan kinerja yang relatif fluktuatif, dengan kecenderungan perlambatan pada 3 tahun terakhir. Masih belum optimalnya kinerja neraca dagang setelah berlakunya beberapa perjanjian ini dilatarbelakangi oleh banyak faktor, seperti kondisi fundamental perekonomian masing-masing negara, krisis pandemi Covid-19, serta permasalahan klasik seperti masih kurangnya sosialisasi bagi pelaku industri Indonesia akan peluang dari perjanjian dan kurangnya kesiapan produk Indonesia di pasar ekspor.

Demi meningkatkan efektivitas perjanjian ini terhadap kinerja neraca dagang Indonesia secara umum, **pertama**, Indonesia harus mempercepat penyusunan peraturan pendukung (PMK, misalnya) yang mengatur detail ketentuan pembebasan tarif serta fasilitas perdagangan lain yang telah disepakati. Penyusunan peraturan ini juga harus diiringi dengan sosialisasi kepada pelaku industri agar dapat memanfaatkan peluang dari perjanjian ini. **Kedua**, Indonesia harus bisa memanfaatkan perjanjian ini sebagai salah satu kebijakan pemulihan ekonomi di masa pandemi. **Ketiga**, mengupayakan percepatan ekspor yang lebih giat dengan mempersiapkan industri Indonesia dalam menghasilkan produk berdaya saing tinggi di pasar EFTA, melalui perbaikan pada tataran regulasi, serta kesiapan sumber daya manusia dan bahan baku. Berbagai kebijakan insentif dari pemerintah yang memberikan kemudahan-kemudahan terkait juga pasti sangat diperlukan oleh industri dalam negeri.

*"Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran
Secara Profesional"*

Budget Issue Brief
Ekonomi & Keuangan
Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian DPR RI
Telp. 021-5715635, Fax. 021-5715635

